



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 376/SEK/OT.01.2/07/2018

5 Juli 2018

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Peningat Pelaporan Triwulan II TA 2018

Pada Aplikasi *e-Monev Ver.3.0* Berdasarkan PP 39/2006

- Yth. 1. Para Sekretaris Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung;  
2. Sekretaris Pengadilan Militer Utama;  
3. Para Sekretaris Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan;  
4. Para Sekretaris Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan.  
Diseluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor 6459/Dt.9.1/06/2018 tanggal 28 Juni 2018; hal Verifikasi Laporan Triwulan II TA 2018 pada Aplikasi *e-Monev Ver.3.0* berdasarkan PP 39/2006, maka bahwa Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan verifikasi atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan II Tahun 2018. Bersama ini pula disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan II TA 2018 dapat melalui Aplikasi *e-Monev ver. 3.0* (<http://e-monev.bappenas.go.id>);
2. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Badan Pembangunan Nasional bahwa seluruh satker bertanggungjawab untuk melakukan input data pada level : Komponen, Output, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan. Adapun data yang dilaporkan berupa : Realisasi Anggaran dan Fisik per bulan, permasalahan yang dihadapi dan bukti pendukung pelaksanaan, baik berupa dokumen, foto dan atau video;
3. Panduan dan mekanisme pelaporan pada Aplikasi *e-Monev ver. 3.0* dapat di unduh pada alamat berikut :  
"<http://emonev.bappenas.go.id/emon3/panduan/pedomanumumlangkahtekhnis.zip>"
4. Dalam pengisian data realisasi rencana pembangunan melalui aplikasi *e-monev PP 39/2006* agar diperhatikan bahwa penginputan sampai dengan bulan Juni 2018 batas waktu sampai dengan tanggal **13 Juli 2018**.

Selanjutnya diharapkan kepada Saudara untuk dapat memberitahukan kepada para petugas yang berkaitan dengan hal tersebut diatas dan apabila masih ada kendala dalam pelaporannya dapat menghubungi Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Ibu Yusnatin (085770920235) atau Ibu Astania (085746412333).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Ketua Kamar Pembinaan;
2. Panitera Mahkamah Agung;
3. Para Direktur Jenderal dilingkungan Mahkamah Agung;
4. Para Kepala Badan dilingkungan Mahkamah Agung;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
www.bappenas.go.id

Nomor : 6459/Dt.9.1/06/2018  
Lampiran : -  
Hal : Verifikasi Laporan Triwulan II TA 2018  
pada Aplikasi e-Monev Ver.3 Berdasarkan PP 39/2006

Jakarta, 28 Juni 2018

Kepada Yth.  
Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga  
(Terlampir)

Bersama surat ini kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama Bapak/Ibu di Kementerian/Lembaga dalam melaporkan secara tepat waktu kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Triwulan I TA 2018 berdasarkan PP No 39 Tahun 2006. Bersama ini pula disampaikan beberapa hal berikut terkait pelaksanaan verifikasi laporan Triwulan II TA 2018:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan II TA 2018 dapat melalui Aplikasi e-Monev Ver.3.0 (<http://e-monev.bappenas.go.id>).
2. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan bahwa seluruh penanggung jawab kegiatan (UKE III) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: Komponen, Output, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Output Kegiatan. Adapun data yang dilaporkan adalah berupa: Realisasi fisik dan Anggaran per bulan, permasalahan yang dihadapi, dan bukti pendukung pelaksanaan, baik berupa dokumen, foto dan atau video.
3. Selanjutnya, setelah triwulan berakhir, Kementerian/Lembaga (C.q: Biro Perencanaan) bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data yang telah dilaporkan oleh UKE II melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006. Masa verifikasi pada Triwulan II TA 2018 adalah 1 – 19 Juli 2018.
4. Panduan dan mekanisme pelaporan pada Aplikasi e-Monev Ver.3.0 dapat diunduh pada alamat berikut: <http://e-monev.bappenas.go.id/emon3/panduan/pedomanumumlangkahteknis.zip>.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi pada Aplikasi e-Monev Ver.3.0, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data kepada kami melalui Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga terkait.

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi kami:

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Jl. Sunda Kelapa No. 9  
Telp/fax. 021-31927438  
e-mail: [laporan\\_pp39@bappenas.go.id](mailto:laporan_pp39@bappenas.go.id)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Randy R. Wrihatnolo

Tembusan Yth. :  
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

6459

Lampiran Surat No.: /Dt.9.1/06/2018

Kepada Yth Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perindustrian;
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kementerian Kesehatan;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Kementerian Sosial;
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
25. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
26. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan;
27. Kementerian Pariwisata;
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
33. Badan Intelijen Negara;
34. Lembaga Sandi Negara;
35. Dewan Ketahanan Nasional;
36. Badan Pusat Statistik;
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
38. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
39. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
40. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
41. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
42. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
43. Lembaga Ketahanan Nasional;
44. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
45. Badan Narkotika Nasional;
46. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
49. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
50. Komisi Pemilihan Umum;
51. Mahkamah Konstitusi;
52. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
53. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
54. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
55. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
56. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

57. Badan Informasi Geospasial;
58. Badan Standardisasi Nasional;
59. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
60. Lembaga Administrasi Negara;
61. Arsip Nasional;
62. Badan Kepegawaian Negara;
63. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64. Kementerian Perdagangan;
65. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
66. Komisi Pemberantasan Korupsi;
67. Dewan Perwakilan Daerah;
68. Komisi Yudisial
69. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
70. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
71. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
72. Badan SAR Nasional;
73. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
74. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;
75. Ombudsman Republik Indonesia;
76. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
77. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
78. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
79. Sekretariat Kabinet
80. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
81. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
82. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
83. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
84. Badan Keamanan Laut
85. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
86. Badan Ekonomi Kreatif.